



Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ekowisata Subak di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan

Gede Rai Amertha Nara Utama¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, I Ketut Winaya³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: raiamertha2001@gmail.com¹⁾, adisastrawijaya@fisip.unud.ac.id²⁾,
ketutwinaya14@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Jatiluwih Village in Bali is renowned for its subak system. As a tourist village, it's actively enhancing collaborative management to sustain its presence. Collaboration between the village government and residents involves jointly managing Jatiluwih's subak attractions. However, community involvement in its management remains limited. This research aims to grasp the collaborative governance process in developing subak ecotourism management in Jatiluwih. It's a qualitative study using descriptive methods. The analysis draws on the theory of effective collaborative governance. Findings show satisfactory collaboration among the government, private sector, and community, although governmental dominance is an issue. The research results show that collaboration has been running well, with 7 out of 8 indicators showing good performance. The one indicator that needs improvement is the network structure. Recommendations include improving coordination with involved parties, providing understanding to the Jatiluwih community about the benefits of collaboration, and its positive impact on them.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism, Tourism Village Management

1. Pendahuluan

Perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali bisa dikatakan berlangsung sangat pesat, hal ini memberikan dampak yang positif bagi sektor perekonomian masyarakat Bali, yang juga berakibat kepada cepatnya pembangunan daerah. Setiap daerah di Bali memiliki potensi pariwisatanya tersendiri, hal ini menjadikan pemerintah daerah, masyarakat dan juga pihak swasta harus bersinergi untuk melakukan pengelolaan dengan baik agar potensi tersebut terus berkembang dan tetap terjaga.

Pandemi *Covid-19* memberikan efek yang sangat dirasakan dampaknya terhadap semua sektor perekonomian termasuk pariwisata. Masyarakat Bali sangat merasakan dampak dari pandemi, mengingat Bali khususnya Kabupaten Tabanan merupakan destinasi pariwisata yang dikenal dunia. Jumlah kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing yang menurun drastis, hal ini disebabkan oleh adanya larangan bepergian dan ketakutan akan penyebaran virus yang membuat terjadinya

penurunan kunjungan wisatawan. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan ke Tabanan tercatat sebanyak 756.701 orang, turun lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2020 sebelum pandemi *Covid-19*.

Perkembangan pariwisata di Tabanan di tahun 2022 dirasa mulai meningkat, tercatat sebanyak 678.621 kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Kabupaten Tabanan pada tahun 2022, dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu sebanyak 9.107 kunjungan saja. Ini menjadi hal yang sangat positif dirasakan oleh masyarakat saat mulai pulih dari adanya pandemi pada tahun 2020. (Data Dispar Tabanan,2023). Karena meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah mulai kembali mengembangkan pariwisata berbasis desa wisata.

Pemerintah Provinsi Bali dalam beberapa tahun belakang mulai memfokuskan pembangunan pariwisatanya yang berkonsep pada model perkembangan pariwisata berbasis desa wisata. Pengembangan pariwisata berbasis desa wisata yang memiliki tujuan untuk mengelola, menjaga, melestarikan berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah terkait, sehingga dapat memberikan kontribusi berlebih dari segi ekonomi dalam hal meningkatkan pemerataan perekonomian serta pembangunan pada tingkat desa.

Salah satu desa di Bali, yang menerapkan konsep Ekowisata tersebut adalah Desa Jatiluwih. Desa Jatiluwih merupakan sebuah desa wisata yang berada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Desa ini terletak di dataran tinggi yang mengakibatkan desa ini memiliki hawa yang sejuk, selain itu Desa Jatiluwih terkenal akan keindahan sawah yang berundak-undak (*terasering*) yang menjadi daya tarik utama. (Kama Wijaya dkk,2015).

Pengairan sawah di Desa Jatiluwih menggunakan sebuah sistem pengairan subak, merupakan sistem pengairan tradisional Bali yang berbasis kerakyatan. *Subak* dapat diartikan juga sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam sistem persawahan di Bali (Windia, 2015). Subak Jatiluwih pada tahun 2012 telah menerima sebuah penghargaan sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO (Windia dan Wiguna, 2013).

Pada saat ini Desa Jatiluwih sebagai desa wisata masih terus melakukan pengembangan dalam hal manajemen kolaborasi agar eksistensi Desa Wisata Jatiluwih tetap terjaga. Dalam menjaga eksistensi Desa Wisata, tentu saja memerlukan sinergitas antara masyarakat desa, pemerintah, dan juga pihak swasta untuk menjaga kelestarian dari ekowisata yang terletak di Desa Jatiluwih. Sesuai dengan tertuang dalam Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabanan tahun 2019-2025 (RIPPARKAB) dijelaskan bahwa pemerintah dalam melakukan pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dengan berdiri sendiri, melainkan perlu adanya kolaborasi antar pihak.

Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat desa antara lain dengan bersama melakukan pengelolaan Daya Tarik Wisata Subak Jatiluwih. dan juga pemerintah sebagai pihak yang membuat peraturan dan pihak yang memberikan izin para investor untuk membangun restoran dan rumah makan di daerah ekowisata Subak Jatiluwih mewajibkan para investor membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Selain itu terjalin juga sebuah kolaborasi antar pemerintah dengan arahan pihak UNESCO untuk mendirikan Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata hal ini bertujuan agar ekosistem *subak* yang terdapat dalam ekowisata di Desa Jatiluwih bisa terjaga dan tetap asri.

Dalam melakukan kolaborasi, digunakanlah sebuah konsep *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan sebuah proses penyusunan pemerintahan dengan mengikutsertakan organisasi pemerintah dan organisasi swasta dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat, oleh lebih dari dua pihak. Serta setiap pihak memperoleh hak yang sama dan juga kewenangan yang sama tanpa adanya hierarki di dalamnya (Ansell dan Gash, 2008).

Meski demikian, proses implementasi *collaborative governance* Desa Wisata Jatiluwih terlihat, masih

minimnya keterlibatan masyarakat secara signifikan dalam proses pengelolaan dan juga masyarakat kurang dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan dan pengawasan kawasan ekowisata. Masih adanya ketimpangan tanggung jawab antara pihak yang terlibat. Berdasarkan permasalahan di atas terkait bagaimana proses collaborative governance di dalam pengelolaan ekowisata subak pada kawasan desa wisata Jatiluwih maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Subak di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan”.

Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori indikator keberhasilan kolaborasi menurut Deseve dalam Sudarmo (2011) dengan indikator *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*. (Deseve dalam Sudarmo, 2011).

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode penelitian kualitatif diharapkan akan mendapatkan hasil penelitian yang lengkap serta mendalam, sehingga permasalahan dapat dijawab dari hasil observasi dan wawancara. Dengan kata lain metode kualitatif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan cara memaparkan data dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka (Moleong, 2017). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata hasil wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan di lapangan..

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil Temuan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Ekowisata Subak Di Desa Wisata Jatiluwih

Network Structure

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda. Masih ditemukan adanya dominasi peran dari pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pariwisata. Meskipun pengelolaan ini dibawah tanggung jawab pihak dinas pariwisata, tapi secara operasional harian dilaksanakan oleh Manajemen Pengelola DTW Desa Jatiluwih.

Dengan kata lain indikator *Network Structure* yang terdapat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* belum terlaksana secara optimal, karena masih terdapat dominasi salah satu pihak.

Commitment to a Common Purpose

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, komitmen yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat sudah cukup baik, komitmen yang dibentuk sesuai dengan isi dan kesepakatan yang telah disepakati serta adanya komitmen untuk hasil dari kerjasama tersebut yang dapat digunakan secara bersama. Dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam komitmen terhadap tujuan bersama karena semua pihak yang terlibat berkomitmen untuk mencapai tujuan kolaborasi.

Trust Among the Participants

Berdasarkan hasil temuan, dapat dilihat bahwa adanya rasa saling percaya antar pihak yang terlibat baik dari pemerintah, swasta, serta masyarakat. Kepercayaan ini timbul melalui komunikasi baik antar pihak yang terlibat dan memberikan manfaat kepada semua pihak. Indikator *Trust Among the Participants* menunjukkan bahwa kepercayaan antar pihak dalam melakukan kolaborasi berjalan baik.

Governance

Berdasarkan temuan, indikator *Governance* yaitu terkait adanya batasan siapa saja yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, aturan mengenai batasan tindakan atau perilaku pada stakeholders yang ada di dalamnya, dalam melakukan pengelolaan Ekowisata Subak di Desa Jatiluwih sudah berjalan dengan Baik.

Access to Authority

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa indikator *Access to Authority*, yakni ketentuan prosedur yang jelas dan diterima oleh semua, telah terpenuhi. Semua pihak memiliki peraturan kewenangan yang terdefinisi dengan baik dalam perannya..

Distributive Accountability/Responsibility

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, indikator *Distributive Accountability/Responsibility* sebagian besar telah dikelola dengan baik. Baik itu dalam bentuk tanggung jawab, serta pengelolaan dan manajemen ekowisata dilakukan secara bersama.

Information Sharing

Berdasarkan hasil temuan, seluruh pihak yang terlibat sangat mudah dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kolaborasi, dan adanya keterbukaan terkait segala informasi yang di dapat.

Access to Resources

Berdasarkan temuan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator *Access to Resources* telah berjalan dengan baik, seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan ekowisata telah berkontribusi dalam memberikan bantuan sumber daya baik lahan, pendanaan, sarana prasarana penunjang, sumber daya manusia, serta sumber daya yang lainnya.

Kesimpulan

Dilihat dari ukuran keberhasilan collaborative governance, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari 8 indikator, 7 indikator telah berjalan dengan baik yaitu indikator *commitmen to a common purpose, trust among the participants, governance, information sharing, access to resources, access to authority*, serta *distributive accountability/responsibility* dan

1 indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator *network structure*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Muljadi, 2012, Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Afful-Koomson, T., dan Kwabena O. A. 2013. Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa. Africa: Pixedit Limited.
- Agranoff, Robert & M.McGuire. 2003. Collaborative Public Management : New Strategies for Local Governments. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume; 543 571
- Bintarto, R 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Dispar tabanan. (2023, January 13).Data Rekap Desa Wisata Tahun 2022. <https://dispar.tabanankab.go.id/data-rekap-desa-wisata-2022>
- Hamidi. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- Kama Wijaya, G. N., Antara, M., & Windia, W. 2015. “Strategi pengelolaan lingkungan ekowisata Di subak jatiluwih kecamatan penebel kabupaten tabanan”. ECOTROPHIC : Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science), 9(2), 22. <https://doi.org/10.24843/ejes.2015.v09.i02.p04>.
- Moleong, L. J., 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. 1 penyunt. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sudarmo. 2011. Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Smart Media
- Widia, Wayan dan Wiguna. 2013. Subak Warisan Budaya Dunia. Denpasar: Udayana University Press.
- Widia, Wayan.dkk. 2015. Sistem Subak di Bali (Kajian Sosiologis). Udayana University Press, Denpasar